

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN KINERJA
(LKj) 2020**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK (DP3AP2)**



**JL. A. YANI NO. 09 TELANAIPURA JAMBI
Telp. (0741) 60160, Fax. (0741) 62933**

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Swt, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020 telah tersusun sebagai media pertanggungjawaban secara periodic yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Secara umum sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020 sudah optimal dan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020 ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020. Untuk itu kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi untuk tahun berikutnya.

Terima kasih.

KEPALA DINAS

Dra. LUTHPIAH
Pembina Utama Madya / IV c
NIP. 19691215 198908 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Penyusunan LKJ diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, adalah OPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menyangkut tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jambi.

Sebagai pengemban amanah DP3AP2 Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang telah diraih maupun hambatan yang ditemui dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntunan dan perubahan terhadap system nilai dan budaya kerja pemerintahan yang *good governance* sebagai prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tujuan serta cita-cita bangsa dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan. Terkait hal tersebut, perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pokoknya adalah instrument yang digunakan dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja pada seluruh Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu unsur pemerintah yang

berperan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk di wilayah Provinsi Jambi, dipandang perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

2. Tujuan

- a. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur
- b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan kinerjanya

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

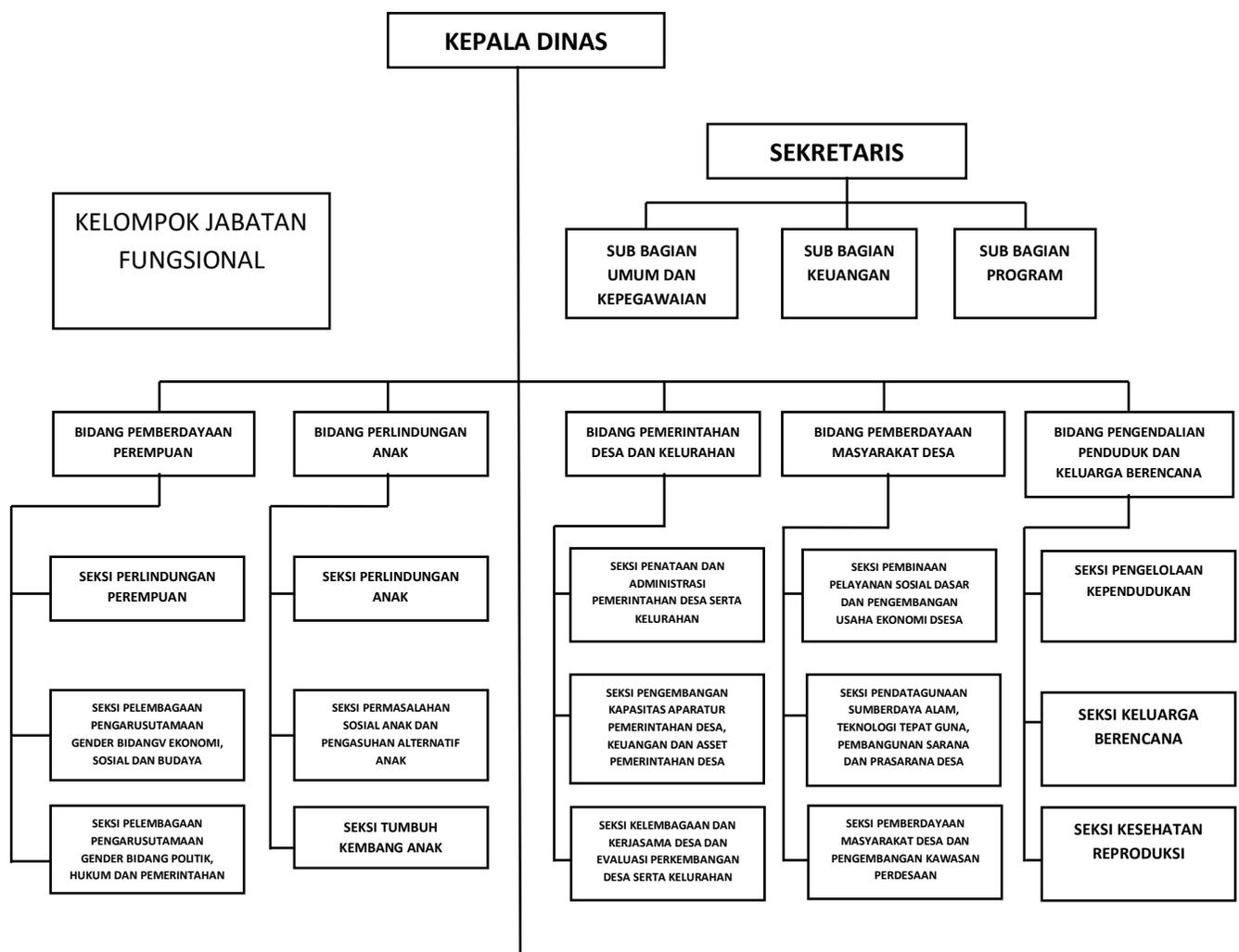
tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor13 Tahun 2019 tentang laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jambi nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pearngkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
8. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perybahan atas pearturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata kerja Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

D. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas adalah sebagai berikut:



2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 Sekretariat, 5 Bidang dan 1 UPTD dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya, dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi :

- 1). Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- 2). Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- 3). Melaksanakan urusan kehumasan;
- 4). Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- 5). Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- 6). Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- 7). Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- 8). Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- 9). Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 10). Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- 11). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sub Bagian Program

- 1). Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- 2). Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- 3). Melaksanakan urusan kehumasan;

- 4).Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- 5). Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- 6). Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- 7). Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- 8). Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- 9). Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 10). Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- 11).Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganbidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dengan fungsi :

- 1). Melaksanakan penyusunan tatalaksana keuangan;
- 2). Melaksanakan urusan perbendaharaan , gaji, perjalanan dinas Dinas;
- 3). Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- 4). Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- 5). Pelaksanakan penyusunan laporan keuangan; dan
- 6). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok :

Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dlm pasal 14.

Fungsi :

Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;

Tugas Pokok :

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan sertapengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup permepuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
- d. Penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria di bidang perlindungan perempuan serta pengemvangan dan penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum, pemerintahan;

- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social, budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social, budaya, hukum dan pemerintahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 (tiga) Seksi antara lain :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok :

Membantu bidang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka perlindungan perempuan :

Fungsi :

- 1).Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 3).Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 4).Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 6).Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 7).Penyusunan data bidang di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- b. Seksi pelebagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tugas Pokok :

Membantu bidang dalam rangka pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya.

Fungsi :

- 1).Penyispan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;

- 3).Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 4).Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi, social dan budaya;
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 7).Penyusunan data di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Tugas Pokok :

Membantu bidang dalam rangka pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Fungsi :

- 1).Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 3).Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 4).Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 6).Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 7).Penyusunan data bidang di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;

- b. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak
- c. Pelaksanaan pemetaan urusan perlindungan anak
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak, dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis, supervise di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Perlindungan Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka perlindungan anak

Fungsi :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan bidang pemberian perlindungan anak;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan anak
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Perlindungan Anak
- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan Anak
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberian perlindungan anak
- 6). Penyusunan data perlindungan anak
- 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Permasalahan Sosial dan pengasuhan alternative Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

Fungsi :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak

- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 7). Penyusunan data di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi tumbuh Kembang Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam bidang Tumbuh Kembang Anak

Fungsi :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 7). Penyusunan data bidang tumbuh Kembang Anak
- 8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Pemberdayaan Desa / Kelurahan

Bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan Pemerintahan Desa.

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa produk hukum desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan,

- pengelolaan keuangan dan asset desa produk hukum desa , pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa , kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa produk hukum desa , pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa , kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa produk hukum desa , pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa , kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan mempunyai 3 (tiga) Seksi, diantaranya

- a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan

Fungsi :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode, penataan kewenangan desa dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan , produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 5). Pemberian bimbingan teknis, supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan administrasi pemerintahan desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan, kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa penamaan, kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa

- 4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa
 - 5). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa
 - 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Serta kelurahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. Penyusunan prosedur pelaksanaan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 3 (tiga) Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan usaha ekonomi desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, pembangunan Sarana dan Prasaran desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa
- 2). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa
- 3). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa

- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordiansi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta

perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu dinas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana terdiri dari 3 (tiga) Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pengelolaan Kependudukan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

- 1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk
- 2). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk

- 3). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Keluarga Berencana

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

- 1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta
- 2). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta
- 3). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Kesehatan Reproduksi

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

- 1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi
- 2). Pemberian dukungan teknis dalam bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi
- 3). Pengumpulan bahan penyusunan perencanaan operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. UPTD PPPA

Tugas Pokok :

Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional / teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Provinsi Jambi dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA
 - b. Penyusunan program kerja UPTD PPA
 - c. Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan kasus
 - d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA
 - e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA
 - f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- UPTD PPA terdiri dari 1 (satu) Subbag dan 2 (dua) Seksi diantaranya :

- a. Subbag Tata Usaha

Tugas Pokok : Mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian keuangan, aset rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA

Fungsi :

- 1). Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
- 2). Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
- 3). Pengelolaan administrasi kepegawaian dan asset
- 4). Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informs layanan
- 5). Penyiapan dukungan umum pelayanan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- b. Seksi Pengaduan

Tugas Pokok :

Membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

Fungsi :

- 1). Penerimaan dan pencatatan pengaduan
- 2). Pengidentifikasian dan kalrifikasi pengaduan
- 3). Pemantauan dan penjangkauan kasusu kekerasan perempuan dan anak
- 4). Pelaksanaan pengelolaan kasusu
- 5). Pengelolaan call center pengaduan
- 6). Perlindungan korban di penampungan sementara
- 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- c. Seksi Tindak lanjut

Tugas Pokok :

Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD PPA .

Fungsi :

- 1). Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya
- 2). Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan
- 3). Pelayanan mediasi
- 4). Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya

E. Sasaran

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan tumbuh kembang anak, dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam pembangunan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
4. Meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya ketahanan keluarga, agar meningkatnya keseimbangan jumlah penduduk dan kualitas keluarga

F. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ARG dengan focus PPRG pada tiap OPD dan regulasi ARG yang akan diacuk OPD Provinsi, Kabupaten, Kota
2. Akselerasi pembentukan kelembagan dengan focus pada pembentukan Pokja PUG, Forum Data dan Focal Point OPD
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, permasalahan Sosial dan Pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak
4. Penguatan Kabupaten Kota layak Anak dengan focus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kabupaten / kota layak anak
5. Peningkatan aparatur desa dan kelurahan dengan focus pada bintek pengelolaan administrasi desa
6. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan focus pada penguatan kelembagaan dan manajemen pengelolaan BUMDes yang baik
7. Peningkatan kompetensi sumber daya dengan focus pada penguatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendamping Desa

8. Peningkatan kesadaran dalam ber-KB dengan focus pada dan edukasi (KIE) pasangan usia suburada komunikasi, informasi

G. Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan. Kebijakan merupakan suatu arahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan presentase ARG melalui PPRG, penetapan regulasi ARG, penguatan kelembagaan focal point dan pemetaan isu gender di masing-masing OPD Provinsi
2. Mempercepat implementasi operasional kelembagaan PUG melalui advokasi, fasilitasi pembentukan lembaga, bantuan teknis operasional lembaga dan pengembangan forum PUG kabupaten,kota dan provinsi
3. Mempercepat implementasi operasional kelembagaan PUG melalui advokasi, fasilitasi pembentukan lembaga, bantuan teknis operasional lembaga dan pengembangan forum PUG kabupaten,kota dan provinsi
4. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO melalui pencegahan kejadian berulang dan peningkatan korban , perlindungan bantuan
5. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO melalui pencegahan kejadian berulang dan peningkatan korban , perlindungan bantuan hukum,pengatan kapasitas P2TP2A, psikiater, pemulihan korban dan reintegrasi social serta peningkatan kapasitas korban
6. Penguatan kelembagaan perlindungan anak, tumbuh kembang anak,permasalahan social dan pengasuhan alternative anak
7. Pandampingan dan fasilitasi kabupaten kota layak anak
8. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa / kelurahan melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang berjenjang
9. Pengatan dan dukungan peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui dukungan sarana prasarana dan kemudahan akses terhadap permodalan serta penggalian potensi perekonomian perdesaan
10. Optimalisasi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan yang mampu berperan secara aktif serta kompetensi sumber daya masyarakat
11. Peningkatan partisipasi ber KB melalui pengembangan desain program, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan memperhatikan kearifan budaya local

H. Isu-Isu Strategi Yang Berpengaruh

Isu-isu yang berpengaruh terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan bidang tugasnya, antara lain :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tingginya korban kekerasan pada anak;
2. Tingginya kasus kekerasan perempuan;
3. Anggaran yang terbatas untuk pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Masih kurangnya peran forum anak;
5. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
7. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
8. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
9. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
10. Belum semua PD melaksanakan PPRG;
11. Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak;
12. Belum optimalnya Program PATBM;
13. Tingginya pekerja anak;
14. Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan;
15. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
16. Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
17. Ditemukannya TPPO;
18. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Isu-isu yang berpengaruh terhadap bidang Pengendalian Penduduk dan KB dapat dilihat berdasarkan bidang tugas nya, antara lain :

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk;
2. Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed);
3. pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
4. Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro;
5. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB;
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Isu-isu yang berpengaruh terhadap bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah dan Desa/Kelurahan dapat dilihat berdasarkan bidang tugas nya, antara lain :

1. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi;
2. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
3. Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi;
4. Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa;
5. Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa;
6. Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa;
7. Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;
8. Belum optimalnya TTG;
9. Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik);
10. Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa;;
11. Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat;
12. Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM.

Selain itu dapat juga memperhatikan permasalahan dan capaian yang dapat diperhatikan melalui beberapa faktor dan indikator dari beberapa bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, antara lain :

1. Persaingan desa dengan mengaktifkan berbagai kondisi yang menggambarkan dengan indikator yang mencakup 5 (lima) Dimensi yaitu:
 - a. Pelayanan Dasar.
 - b. Kondisi Insfrastuktur
 - c. Akseibilitas/trasnportasi
 - d. Pelayanan publik
 - e. Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari Indikator tersebut diatas maka akan dapat tingkat perkembangan pembangunan desa.

2. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Tercatat ada 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan criteria perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Sebagai upaya memenuhi target yang telah ditetapkan untuk mengentaskan daerah tertinggal, berbagai program pemerintah melalui pembuatan program kegiatan akan fokus pada 3 aspek, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pada aspek sarana dan prasarana dilakukan pembangunan jalan non status/jalan strategis, pembangunan pasar kecamatan, pembangunan listrik pedesaan, pembangunan jembatan antar desa, pembangunan

sarana air bersih masyarakat, pembangunan jaringan irigasi dan pembangunan dermaga. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia dilakukan pembangunan ruang kelas baru, kegiatan belajar mengajar masyarakat, laboratorium sekolah, pembangunan Puskesmas, pemenuhan alat kesehatan Puskesmas, dan pelatihan tenaga kerja baru. Kemudian pada aspek pertumbuhan ekonomi dilakukan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian, bantuan usaha UMKM, bantuan pengembangan peternakan modern, dan pembangunan kebun buah di daerah tertinggal. (Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia).

3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga perlu mendapatkan perhatian dalam skala nasional. Tercatat ada 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan criteria perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Sebagai upaya memenuhi target yang telah ditetapkan untuk mengentaskan daerah tertinggal, berbagai program pemerintah melalui pembuatan program kegiatan akan fokus pada 3 aspek, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pada aspek sarana dan prasarana dilakukan pembangunan jalan non status/jalan strategis, pembangunan pasar kecamatan, pembangunan listrik pedesaan, pembangunan jembatan antar desa, pembangunan sarana air bersih masyarakat, pembangunan jaringan irigasi dan pembangunan dermaga. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia dilakukan pembangunan ruang kelas baru, kegiatan belajar mengajar masyarakat, laboratorium sekolah, pembangunan Puskesmas, pemenuhan alat kesehatan Puskesmas, dan pelatihan tenaga kerja baru. Kemudian pada aspek pertumbuhan ekonomi dilakukan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian, bantuan usaha UMKM, bantuan pengembangan peternakan modern, dan pembangunan kebun buah di daerah tertinggal. (Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia).

- a. Faktor Internal

- 1). Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
- 2). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3). Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
- 4). Mentalitas Pengusaha UKM
- 5). Kurangnya Transparansi

- b. Faktor Eksternal

- 1). Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
- 2). Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

- 3). Pungutan Liar
 - 4). Implikasi Otonomi Daerah
 - 5). Implikasi Perdagangan Bebas
 - 6). Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
 - 7). Terbatasnya Akses Pasar
 - 8). Terbatasnya Akses Informasi
4. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga perlu mendapatkan perhatian Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak merupakan dasar yang penting dalam perkembangan masyarakat. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas masyarakat yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pencapaian millenium Development Goals (MDGs) tahun 2016.
 5. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Provinsi Jambi pada Tahun 2013 (277.740), tahun 2014 (263.800) dan tahun 2015 (162.779). (Sumber : Jambi Dalam Angka, 2015)
 6. Untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat ditingkatkan melalui ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut. Capaian IPM Provinsi Jambi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2013 (67,76%), tahun 2014 (68,24%) dan tahun 2015 (68,89%) dengan perbandingan capaian IPM Nasional pada tahun 2013 (68,31%), tahun 2014 (68,90%) serta tahun 2015 (69,55%). Meskipun capaian IPM Provinsi Jambi dibawah capaian IPM Nasional, perbedaan capaian IPM Provinsi Jambi tidak terlampau jauh dari capaian IPM nasional, dan Provinsi Jambi pada Tahunan 2015 berada di Peringkat 17 secara nasional. (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015)
 7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Secara umum, pembangunan gender Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2013 (87,69%), 2014 (87,88%) dan 2015 (88,44%). Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahunnya, namun capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi tetap dibawah capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional pada tahun 2013 (90,19%), 2014 (90,34%), 2015 (91,83%), 2016 (88,29%), 2017 (88,13%) dan 2018 (88,44%).
 8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Secara umum, pemberdayaan gender Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2015 (64,22%) dapat dilihat pada Keterlibatan Perempuan di Parlemen (14,55%), Perempuan sebagai Tenaga Profesional (48,66%) dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (28,82). Meskipun Indeks

Pemberdayaan Gender Provinsi Jambi mengalami peningkatan di setiap tahunnya, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jambi masih berada dibawah capaian Indeks Pemberdayaan Gender Nasional Tahun 2015 (70,83%), 2016 (62,02%), 2017 (65,32%) dan 2018 (67,78%). (Sumber : Berita Resmi Statistik No.05/10/08Th.I)

9. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

10. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
11. Kasus KDRT dalam Provinsi Jambi tahun 2016 sebanyak 444 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 140 Kasus. Terdapat penurunan jumlah KDRT di Provinsi Jambi ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat akan besarnya tuntutan hukuman bagi pelaku KDRT kepada perempuan dan anak. Jumlah korban KDRT yang melapor ke UPTD PPA Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1
Kasus KDRT Terhadap Perempuan Dan Anak di Provinsi Jambi

| No. | Tahun | Jumlah | |
|-----|-------|--------|-----------|
| | | Anak | Perempuan |
| 1. | 2016 | 65 | 59 |
| 2. | 2017 | 52 | 48 |

| | | | |
|----|------|----|----|
| 3. | 2018 | 72 | 72 |
| 4. | 2019 | 64 | 43 |
| 5. | 2020 | 58 | 42 |

(Sumber : UPTD PPA Provinsi Jambi).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan
 - a. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
 - b. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak
2. Meningkatkan Usaha Ekonomis, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan desa
 - a. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat
 - b. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
 - c. Meningkatnya kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa
3. Rate (TFR) Per Perempuan usia produktif
Menurunnya Total Fertility

Tabel 2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2016 – 2021

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | |
|----|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA Dalam pembangunan | Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan | Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan | 27,63 | 27,63 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak | Persentase jumlah Kab/Kota Layak Anak | 36,3 | 36,3 | 54,4 | 72,7 | 72,7 | 100 |
| 2 | Meningkatkan Usaha Ekonomi, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Pemerintahan Desa | Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase BumDes yang terbentuk | 36,59 | 50,53 | 92,99 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif | Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| | | Meningkatkan kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Cepat Berkembang | 5,93 | 5,93 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 12,0 |
| 3 | Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi | Total Fertility Rate (TFR) | 2,28 | 2,26 | 2,23 | 2,21 | 2,21 | 2,15 |

B. Program Dan kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP3) Provinsi Jambi bersama instansi terkait dan atas dukungan dan partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP3) Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Kantor;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Penyediaan Makan dan Minum;
- j. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A);
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- d. Evaluasi Pelaksanaan PUG;
- e. Prlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan;
- f. Pembinaan organisasi perempuan;
- g. Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak;
- h. Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak;
- i. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT;
- j. Bimtek Pendidikan Politik Perempuan;
- k. Bimtek Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan.

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

- a. Pemberdayaan Nilai-nilai Kegotongroyongan Adat Daerah dan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. . Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- d. Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Manajemen BumDesa.

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG;
- b. Pembinaan dan Penilaian P2WKSS;
- c. Penguatan Pendampingan di Perdesaan;
- d. Penguatan Kapasitas Pengelolaan BumDesa;
- e. Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu;
- f. Pameran Hasil Karya di Bidang Pembangunan/Jambore;
- g. Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsimas.

9. Program Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pembinaan Kampung KB;
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR);
- c. Momentum Hari Keluarga Nasional (HARGANAS);
- d. Workshop Pendidikan Politik Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK).

C. Program Kerja

Pada Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, melaksanakan Program / Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3
Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Dan Pengendalian Penduduk Tahun 2020

| No | Program dan Kegiatan | Pagu Anggaran Rp |
|------------|---|--------------------|
| 1 | 3 | 4 |
| I | Program Pelayanan Administrasi | 752.998.600 |
| | 1. Penyediaan jasa surat menyurat | 3.510.000 |
| | 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 99.267.200 |
| | 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan | 96.651.800 |
| | 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor | 80.000.000 |
| | 5. Penyediaan alat tulis kantor | 115.975.765 |
| | 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 19.985.020 |
| | 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 18.001.910 |
| | 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.511.792 |
| | 9. Penyediaan makanan dan minuman | 13.715.713 |
| | 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 300.379.400 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 375.934.400 |
| | 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 50.990.000 |
| | 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | 304.944.400 |
| | 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 20.000.000 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 63.050.000 |
| | 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 63.050.000 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 30.000.000 |
| | 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal | 30.000.000 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 277.102.480 |
| | 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 277.102.480 |
| VI | Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 1.415.118.460 |
| | 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 150.000.000 |
| | 2. Evaluasi Pelaksanaan PUG | 238.680.920 |
| | 3. tentang Perlindungan Pembinaan Organisasi Perempuan | 350.000.000 |
| | 4. Pembinaan dan pengembangan Kota layak Anak | 100.000.000 |
| | 5. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Anak | 100.000.000 |
| | 6. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT | 120.003.540 |
| | 7. Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan | 300.000.000 |
| | 8. Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan | 56.434.000 |
| VII | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 300.000.000 |
| | 1. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR) | 69.623.000 |
| | 2. Momentum Hari Keluarga Nasional | 68.955.400 |
| | 3. Workshop Pendidikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) | 61.421.600 |
| | 4. Penguatan Advokasi Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana | 100.000.000 |
| VII | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 1.800.000.000 |
| | 1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | 1.500.000.000 |
| | 2. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | 200.000.000 |
| | 3. Penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan Desa | 100.000.000 |
| VIII | Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | 454.981.540 |
| | 1. Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG | 100.000.000 |
| | 2. Pembinaan dan Penilaian P2WKSS | 129.981.540 |
| | 3. Penguatan Pendampingan di Perdesaan | 100.000.000 |
| | 4. Penguatan Kapasitas Pengelolaan BumDes | 75.000.000 |
| | 5. Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu | 50.000.000 |

Program kerja Tahun Anggaran 2020 yang sudah disusun, perlu adanya komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dengan Kepada Daerah yang akan merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran, melalui Penetapan Kinerja dan penegasannya dengan Perjanjian Kinerja, sehingga Perangkat Daerah tidak bisa menyimpang dari Penetapan Kinerja yang telah disusun seperti terlihat pada tabel 3 dan 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

| Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Anggaran |
|---|--|--------|---|-------------|
| Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan | 30 % | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | |
| | | | - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 77.100.000 |
| | | | - Evaluasi Pelaksanaan PUG | 109.100.320 |
| | | | - Pembinaan Organisasi Perempuan | 217.727.700 |
| Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Persentase Penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100 % | - Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT | 102.454.987 |
| | | | - Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan | 246.814.000 |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak | Persentase Jumlah Kota Layak Anak | 72,7 % | - Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak | 53.975.000 |
| | | | - Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Perlindungan Anak | 58.150.000 |
| Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase BumDesa yang Terbentuk | 100 % | Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan | |
| | | | - Penguatan Kapasitas Pengelolaan BumDes | 49.365.000 |
| | Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan Yang Aktif | 100 % | Penguatan Pendampingan di Pedesaan | 84.399.800 |
| | Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG | 20 % | Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG | 66.346.500 |
| Meningkatnya | Persentase Desa | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------|--|-------------|
| Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa | Cepat Berkembang | 7 % | - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 715.000.000 |
| | | | - Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | 68.367.062 |
| | | | - Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan Desa | 15.170.000 |
| Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan Usia Reproduksi | Total Fertility Rate (TFR) | 2,21 % | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | - Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR) | 10.000.000 |
| | | | - Workshop Pendidikan Program KKBPK | 28.688.000 |
| | | | - Penguatan Advokasi Pengendalian Penduduk dan KB | 82.000.000 |

Tabel 5

Penetapan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2020

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | 30 % |
| | Meningkatnya penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100 % |
| | Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak | Persentase jumlah Kab/Kota Layak Anak | 72,7 % |
| 2 | Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase BumDesa yang terbentuk | 100 % |
| | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif | 100 % |
| | | Persentase Peningkatan kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG | 20 % |
| | Meningkatnya kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa | Persentase Desa cepat berkembang | 7 % |
| 3 | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi | Total Fertility Rate (TFR) | 2,21 % |

| | Program | Anggaran | K e t |
|---|--|-------------------|-------|
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 752.998.600,- | APBD |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 375.934.400,- | APBD |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. 63.050.000,- | APBD |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 30.000.000,- | APBD |

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------------------|------|
| 5 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 277.101.480,- | APBD |
| 6 | Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Rp. | 1.415.118.460,- | APBD |
| 7 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Rp. | 300.000.000,- | APBD |
| 8 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Rp. | 1.800.000.000,- | APBD |
| 9 | Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | Rp. | 454.981.540,- | APBD |
| JUMLAH | | Rp. | 5.469.184.480,- | |

Dengan menganalisa antara Program Kegiatan, Rencana Kerja (Renja) tidak ada perbedaan atau sejalan dengan Penetapan Kinerja maupun Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

D. Rencana Strategis

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomot 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA OPD Tujuan, Strategi dan kebijakan yang tertuang didalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran Program yang di tetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi menyusun dan menetapkan RENSTRA DP3AP2 Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD. Gambaran tentang hubungan antara RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan Dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan Sistem Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis sebagai berikut:

Tabel 6
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangka t daerah Penang-ung-jawab |
|--|--|------|--|---|--|---|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | target | Rp | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| Meningkatkan Pengarus tamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | | | Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | 27,63 | 27,63 | - | 27,63 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | DP3AP2 |
| | | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Bimtek Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran Responsife Gender | Jumlah peserta bimtek PPGR dan Vokal Point di SKPD | | - | - | 46 | 250.000,000 | 46 | 300.000,000 | 46 | 350.000,000 | 46 | 400.000,000 | 46 | 400.000,000 | 46 | 1.700.000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dana anak | Jumlah peserta pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | 10 | seluruh organisasi/ lembaga | 150.000,000 | seluruh organisasi/ lembaga | 200.000,000 | seluruh organisasi/ lembaga | 250,000,000 | seluruh organisasi/ lembaga | 300.000,000 | seluruh organisasi/ lembaga | 350.000,000 | seluruh organisasi/ lembaga | 400.000,000 | seluruh organisasi/ lembaga | 1,650.000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender | Jumlah peserta per- Kab/Kota yang mengikuti pengetahuan masyarakat tentang ketahanan keluarga | 33 orang/11 Kab/Kota | 11 | 100.000,000 | 33 orang/11 Kab/Kota | 200.000,000 | 33 orang/11 Kab/Kota | 300.000,000 | 33 orang/11 Kab/Kota | 250.000,000 | 33 orang/11 Kab/Kota | 250.000,000 | 33 orang/11 Kab/Kota | 300.000,000 | 33 orang/11 Kab/Kota | 1,400.000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG | Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG | 1 | 1 | 150.000,000 | 1 | 150.000,000 | 1 | 200.000,000 | 2 | 400.000,000 | 2 | 400.000,000 | 2 | 400.000,000 | 9 | 1.700.000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas hiduo perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi | Jumlahkelompok perempuan yang terlatih dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi | 20 | 20 | 150.000,000 | 40 | 200.000,000 | 50 | 250,000,000 | 75 | 300.000,000 | 75 | 350.000,000 | 50 | 250.000,000 | 335 | 1.650.000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Sosialisasi Pendidikan politik Perempuan | Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik | - | - | - | - | - | 50 | 250.000,000 | 50 | 250.000,000 | 50 | 250.000,000 | 50 | 250.000,000 | 200 | 1.000.000,000 | DP3AP2 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|---|------|--|--|--|---|---------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi PUG bidang hukum dan pemerintahan | Jumlah peserta peran wanita dalam bidang hukum dan pemerintahan | - | - | - | - | - | - | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 300 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi PUG bidang Sosial Budaya | Jumlah peserta peran wanita dalam bidang Sosial budaya | - | - | - | - | - | - | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 300 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan. | Jumlah kabupaten pembina tenaga kerja perempuan | 11 | 11 | 100.000,000 | 11 | 120.000,000 | 11 | 120.000.000 | 11 | 150.000.000 | 11 | 150.000.000 | 11 | 170.000.000 | 11 | 810.000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Jumlah organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW) | 2 | 2 | 350.000,000 | 2 | 400.000,000 | 2 | 400.000.000 | 2 | 450.000.000 | 2 | 450.000.000 | 2 | 450.000.000 | 2 | 2.500.000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | Jumlah peserta peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | 30 | - | - | 50 | 250.000,000 | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 370 | 1.250.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS | Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS | 11 | - | - | - | - | 11 | 250.000.000 | 11 | 300.000.000 | 11 | 300.000.000 | 11 | 300.000.000 | 11 | 1.150.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan | Jumlah data terpilah gender | 1 | 1 | 60.000,000 | 1 | 70.000,000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000,000 | 1 | 80.000,000 | 6 | 450.000,000 | DP3AP2 |
| | Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100,0 | 100,0 | 1.086.000.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | DP3AP2 |
| | | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Persentase Operasional P2TP2A | 100 | 100 | 240.000,000 | 100 | 350.000,000 | 100 | 450.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 600 | 3.000.000.000 | DP3AP2 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|------|---|--|--|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Jumlah anak yang mengikuti forum anak | 40 | 40 | 390.000.000 | 50 | 400.000.000 | 60 | 450.000.000 | 70 | 500.000.000 | 80 | 525.000.000 | 90 | 550.000.000 | 390 | 2.815.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak | Jumlah anak yang mengikuti jambore untuk pengembangan tumbuh kembang anak | 40 | 40 | 60.000.000 | 40 | 90.000.000 | 40 | 120.000.000 | 40 | 150.000.000 | 40 | 170.000.000 | 40 | 200.000.000 | 240 | 790.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Kreasi anak provinsi jambi | Jumlah peserta Anak yang mengikuti kreasi anak se Provinsi Jambi | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000.000.000 | 2.000 | 1.000.000.000 | 2.000 | 1.000.000.000 | 6.000 | 3.000.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak | Jumlah Peserta sosialisasi kepemilikan Akta kelahiran anak | 50 | 50 | 100.000.000 | 80 | 120.000.000 | 90 | 150.000.000 | 100 | 250.000.000 | 150 | 300.000.000 | 200 | 350.000.000 | 670 | 1.270.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Sosialisasi Tentang Forum Anak bagi Kepala Sekolah, Guru dan Instansi Terkait | Jumlah peserta sosialisasi Forum Anak | - | - | - | - | - | - | 60 | 250.000.000 | 70 | 270.000.000 | 80 | 330.000.000 | 210 | 850.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | In House Training Basic life support (BLS) bagi pengurus Forum Anak | Jumlah peserta BLS | - | - | - | - | - | - | 40 | 180.000.000 | 40 | 200.000.000 | 60 | 250.000.000 | 140 | 630.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Pelatihan telepon sahabat anak (TESA) | Jumlah peserta TESA | - | - | - | - | - | - | 60 | 250.000.000 | 70 | 270.000.000 | 80 | 330.000.000 | 210 | 850.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Sosialisasi Kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) | Jumlah peserta PUHA | - | - | - | - | - | - | 60 | 250.000.000 | 70 | 270.000.000 | 80 | 330.000.000 | 210 | 850.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) | Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan KLA | 4 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 200.000.000 | 6 | 400.000.000 | 9 | 600.000.000 | 11 | 800.000.000 | 11 | 2.300.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Pelatihan Website Kota Layak Anak (KLA) | Jumlah peserta yang dapat mengaplikasi kan website KLA | - | - | - | - | - | - | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 150 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Sosialisasi Sekolah Layak Anak | Jumlah peserta yang mengetahui sekolah layak anak | - | - | - | - | - | - | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 150 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak | Jumlah peserta yang dapat mewujudkan puskesmas ramah anak | - | - | - | - | - | - | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 150 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak | Jumlah peserta Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak | - | - | - | - | - | - | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 150 | 600.000.000 | DP3AP2 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|------|---|---|--|---|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan | Jumlah peserta yang memahami tentang pola asuh anak dalam keluarga | - | - | - | - | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 200 | 800.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Sosialisasi dampak pernikahan usia anak | Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini | - | - | - | - | - | - | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 150 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak | Jumlah kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 2 | 2 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 400.000.000 | 2 | 500.000.000 | 2 | 600.000.000 | 2 | 2.150.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem Informasi Gender dan anak | Jumlah Buku data | - | - | - | - | - | - | 70 | 500.000.000 | 70 | 500.000.000 | 70 | 500.000.000 | 210 | 1.500.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) tentang perlindungan anak | Jumlah peserta yang mengikuti bintek | 210 | 210 | 120.000.000 | 120 | 200.000.000 | 120 | 300.000.000 | 120 | 400.000.000 | 210 | 500.000.000 | 120 | 550.000.000 | 1.260 | 2.070.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa | Jumlah anak smp/sma/ sederajat yang mendapat sosialisasi | 100 | 100 | 150.000.000 | 200 | 200.000.000 | 300 | 250.000.000 | 300 | 300.000.000 | 300 | 350.000.000 | 300 | 400.000.000 | 1.500 | 1.650.000.000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan Sosialisasi GN-AKSA | jumlah peserta yang mengikuti GN - AKSA | 50 | 50 | 150.000.000 | 60 | 200.000.000 | 60 | 250.000.000 | 60 | 250.000.000 | 60 | 300.000.000 | 60 | 300.000.000 | 350 | 1.850.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan PATBM kab/kota se-prov jambi | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PATBM | 60 | 60 | 150.000.000 | 60 | 200.000.000 | 60 | 250.000.000 | 60 | 250.000.000 | 60 | 300.000.000 | 60 | 300.000.000 | 360 | 1.450.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan bintek bagi SDM pelayanan & pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak | jumlah pelatih pendampinga anak | 20 | 20 | 200.000.000 | 40 | 250.000.000 | 60 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 120 | 250.000.000 | 420 | 1.450.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Sosialisasi PERDA Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak | Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak | - | - | - | - | - | - | 11 | 250.000.000 | 11 | 250.000.000 | 11 | 250.000.000 | 11 | 750.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Pelatihan Operator SIGA berorientasi pada SIMFONI | Jumlah peserta yang memahami SIGA | - | - | - | - | - | - | 50 | 250.000.000 | 50 | 250.000.000 | 50 | 250.000.000 | 150 | 750.000.000 | DP3AP2 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | |
|--------|---------|------|---|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|--|--------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa | Jumlah peserta Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 400.000.000 | 1800 | 400.000.000 | 1800 | 400.000.000 | 5.400 | 1.200.000.000 | | DP3AP2 | |
| | | | kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat | Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 330 | 350.000.000 | 330 | 350.000.000 | 330 | 350.000.000 | 990 | 1.050.000.000 | | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 500.000.000 | 610 | 500.000.000 | 610 | 500.000.000 | 1.830 | 1.500.000.000 | | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa | Jumlah Peserta penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa | 5% | 20% | 300.000.000 | 50% | 300.000.000 | 75% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.800.000.000 | | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan penguatan kelembagaan LPM | Jumlah peserta penguatan Kelembagaan LPM | 400 | 400 | 900.000.000 | 400 | 900.000.000 | 400 | 900.000.000 | 400 | 900.000.000 | 400 | 900.000.000 | 400 | 900.000.000 | 2400 | 5.400.000.000 | | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 330 | 250.000.000 | 330 | 250.000.000 | 330 | 250.000.000 | 990 | 750.000.000 | | DP3AP2 | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG | 1,0 | 2,0 | - | 3,0 | - | 6,0 | - | 20,0 | - | 45,0 | - | 100,0 | 0 | 100,0 | - | | DP3AP2 |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG | Kelompok Posyantek TTG di Kecamatan | 11 | 11 | 270.000.000 | 11 | 290.000.000 | 11 | 320.000.000 | 11 | 350.000.000 | 11 | 385.000.000 | 11 | 385.000.000 | 11 | 2.000.000.000 | | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat membangun Desa | Jumlah kab/Kota kelompok masyarakat yang terbina | - | - | - | - | - | - | 10 | 150.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 300.000.000 | 10 | 700.000.000 | | DP3AP2 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|--|------|---|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif | Jumlah kelompok yang di latih | 50 | 80 | 200.000.000 | 50 | 150.000.000 | 100 | 300.000.000 | 150 | 350.000.000 | 200 | 500.000.000 | 500 | 1.200.000.000 | 1.080 | 2.700.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa | Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam program inovasi Desa | - | - | - | - | - | - | 10 | 200.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 300.000.000 | 10 | 750.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Pameran hasil karya di bidang pembangunan/Jam bore | Jumlah Kab/kota yang mengikuti Pameran Hasil karya di Bidnag Pembangunan | - | - | - | - | - | - | 11 | 500.000.000 | 11 | 600.000.000 | 11 | 600.000.000 | 11 | 1.700.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Desa | Jumlah Peserta yang diberdayakan dalam pengelolaan sumber daya alam desa | - | - | - | - | - | - | 30 | 200.000.000 | 30 | 200.000.000 | 30 | 200.000.000 | 90 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanal posyandu | Jumlah peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu | 45 | 45 | 100.000.000 | 45 | 110.000.000 | 45 | 120.000.000 | 45 | 120.000.000 | 45 | 150.000.000 | 45 | 200.000.000 | 45 | 800.000.000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan penguatan kelembagaan KPA dan P4GN | Jumlah kabupaten peran Masyarakat terhadap dampak dari penyalahgunaan Narkoba | 11 | 11 | 100.000.000 | 11 | 165.000.000 | 11 | 180.000.000 | 11 | 200.000.000 | 11 | 200.000.000 | 11 | 410.000.000 | 11 | 1.255.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan penguatan kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia | Jumlah kab/Kota dalam peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia | 11 | 11 | 80.000.000 | 11 | 110.000.000 | 11 | 120.000.000 | 11 | 130.000.000 | 11 | 140.000.000 | 11 | 220.000.000 | 11 | 800.000.000 | DP3AP2 |
| | Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa | | | Persentase Desa Cepat Berkembang | 5,93 % | 5,93 % | - | 5,93 % | - | 6,2 % | - | 7,0 % | - | 10,0 % | - | 12,0 % | - | 12,0 % | 0 | DP3AP2 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Bimtek Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dimbidang ma | 500 | 500 | 1.000.000.000 | 500 | 1.000.000.000 | 500 | 1.000.000.000 | 500 | 1.000.000.000 | 500 | 1.000.000.000 | 500 | 1.000.000.000 | 3.000 | 6.000.000.000 | DP3AP2 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|------|--|--|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan Pelatihan aparaturnya pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang manajemen | - | - | 200 | 400.000.000 | 200 | 400.000.000 | 200 | 400.000.000 | 200 | 400.000.000 | 200 | 400.000.000 | 1.000 | 2.000.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan bintek penyusunan profil desa | Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa | 87 | 95 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 1.800.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Bimtek Penataan dan Pengelolaan Asset Desa | Jumlah peserta yang memahami penataan dan pengelolaan Asset Desa | - | - | - | - | - | - | 200 | 550.000.000 | 200 | 550.000.000 | 200 | 550.000.000 | 600 | 1.650.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah peserta yang memahami perencanaan pembangunan desa | - | - | - | - | - | - | 200 | 550.000.000 | 200 | 550.000.000 | 200 | 550.000.000 | 600 | 1.650.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | kegiatan Bimtek penyusunan peraturan Desa (Perdes) | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Produk hukum yang sesuai aturan | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 200 | 500.000.000 | 200 | 500.000.000 | 200 | 500.000.000 | 600 | 1.500.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Advokasi penataan desa | Jumlah peserta aparaturnya penataan desa | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 200 | 225.000.000 | 200 | 225.000.000 | 200 | 225.000.000 | 600 | 675.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan rakor pemerintahan desa | Jumlah peserta pembinaan peserta rakor | 330 | 330 | 250.000.000 | 330 | 250.000.000 | 330 | 250.000.000 | 330 | 250.000.000 | 330 | 250.000.000 | 330 | 250.000.000 | 1.980 | 1.500.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan penguatan kapasitas aparaturnya desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan | jumlah peserta penguatan kapasitas aparaturnya desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 500.000.000 | 610 | 500.000.000 | 610 | 500.000.000 | 1.830 | 1.500.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi | 11 | 11 | 1.600.000.000 | 11 | 1.600.000.000 | 11 | 1.600.000.000 | 11 | 2.000.000.000 | 11 | 2.000.000.000 | 11 | 2.000.000.000 | 11 | 10.800.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan nilai-nilai kegotongroyongan, adat daerah, dan masyarakat hukum adat | Jumlah Kab/Kota yang mengikuti | 11 | 11 | 300.000.000 | 11 | 350.000.000 | 11 | 400.000.000 | 11 | 450.000.000 | 11 | 500.000.000 | 11 | 550.000.000 | 11 | 2.550.000.000 | DP3AP2 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|---|--|------|--|--|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi | 22 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 132 | 4.500.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Bimtek Penguatan Pemerintahan Kewilayahan dan Masyarakatan Desa | Persentase desa di Prov.Jambi yg mencapai kategori tertinggi yaitu desa/kelurahan cepat berkembang | 22 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 22 | 750.000.000 | 132 | 4.500.000.000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa | Jumlah peserta Bimtek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa | 5 | 10 | 750.000.000 | 15 | 750.000.000 | 20 | 750.000.000 | 25 | 750.000.000 | 30 | 750.000.000 | 30 | 750.000.000 | 130 | 4.500.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan operasional pemantauan pelaksanaan dana desa | Persentase operasional pemantauan pelaksanaan dana desa | 270 | 270 | 750.000.000 | 270 | 750.000.000 | 270 | 750.000.000 | 270 | 750.000.000 | 270 | 750.000.000 | 270 | 750.000.000 | 1.620 | 4.500.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Penguatan Pendampingan di perdesaan | Jumlah kabupaten dengan Tenaga Professional untuk pendampingan desa | 10 | 10 | 800.000.000 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.200.000.000 | 10 | 1.250.000.000 | 10 | 1.500.000.000 | 10 | 1.500.000.000 | 10 | 7.250.000.000 | DP3AP2 |
| Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi | | | Total Fertility Rate (TFR) | 2,31 | 2,28 | - | 2,26 | - | 2,23 | - | 2,21 | - | 2,18 | - | 2,15 | - | 2,15 | - | DP3AP2 |
| | | | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pembinaan kampung KB | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kampung KB | - | - | - | - | - | 11 | 200.000.000 | 11 | 600.000.000 | 11 | 1.500.000.000 | 11 | 3.600.000.000 | 11 | 5.900.000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR) | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi BKR | - | - | - | - | - | - | 275 | 200.000.000 | 825 | 500.000.000 | 1.650 | 1.200.000.000 | 2.750 | 1.900.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Balita (BKB) | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi BKB | - | - | - | - | - | - | 275 | 200.000.000 | 825 | 500.000.000 | 1.650 | 1.200.000.000 | 2.750 | 1.900.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Lansia (BKL) | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi BKL | - | - | - | - | - | - | 275 | 200.000.000 | 825 | 500.000.000 | 1.650 | 1.200.000.000 | 2.750 | 1.900.000.000 | DP3AP2 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|------|--|--|--|---|----|---------|----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------|----------------------|--------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan Penguatan Tenaga Kesehatan Reproduksi untuk PIK | Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi untuk PIK | - | - | - | - | - | - | 60 | 150.000.000 | 80 | 200.000.000 | 100 | 250.000.000 | 240 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro | - | - | - | - | - | - | 80 | 200.000.000 | 100 | 250.000.000 | 120 | 300.000.000 | 300 | 750.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Fasilitas sosialisasi pemeriksaan dini kanker reproduksi dengan IVA | Jumlah Peserta yang memeriksakan diri melalui IVA tes | - | - | - | - | - | - | 275 | 300.000.000 | 330 | 400.000.000 | 440 | 500.000.000 | 1.045 | 1.200.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi peran tenaga kesehatan dalam peningkatan ber-KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes) | Jumlah tenaga kesehatan yang berperan dalam peningkatan ber-KB | - | - | - | - | - | - | 275 | 300.000.000 | 330 | 400.000.000 | 440 | 500.000.000 | 1.045 | 1.200.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Pemuktahiran Data kependudukan | Jumlah Buku Data Kependudukan | - | - | - | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 550.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan raker penyerasian data kependudukan dan KB se-Provinsi Jambi | Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Raker penyerasian data KB | - | - | - | - | - | - | 11 | 200.000.000 | 11 | 200.000.000 | 11 | 200.000.000 | 11 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan pada Kab/Kota | Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi penyusunan parameter kependudukan | - | - | - | - | - | - | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 150 | 600.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Workshop Pendidikan Program KKBPK | Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pendidikan Program KKBPK | - | - | - | - | - | - | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 180 | 300.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan penguatan advokasi pengendalian penduduk dan KB | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | - | - | - | - | - | - | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 180 | 300.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi peran serta KB Pria (Vasektomi) dalam pengendalian penduduk | Jumlah peserta yang memahami peran serta KB pria | - | - | - | - | - | - | 275 | 300.000.000 | 330 | 400.000.000 | 440 | 500.000.000 | 1.045 | 1.200.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Momentum HARGANAS | Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS | - | - | - | - | - | - | 100 | 250.000.000 | 150 | 300.000.000 | 200 | 350.000.000 | 450 | 900.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKB | Jumlah POKTAN BKB yang melaksanakan 8 Fungsi Keluarga | - | - | - | - | - | - | 11 | 300.000.000 | 14 | 400.000.000 | 16 | 500.000.000 | 41 | 1.200.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKL | Jumlah POKTAN BKL yang melaksanakan 8 Fungsi Keluarga | - | - | - | - | - | - | 11 | 300.000.000 | 14 | 400.000.000 | 16 | 500.000.000 | 41 | 1.200.000.000 | DP3AP2 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|---|---------|------|---|--|--|---|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi POKTAN BKR | Jumlah POKTAN BKR yang melaksanakan 8 Fungsi Keluarga | - | - | - | - | - | - | 11 | 300.000.000 | 14 | 400.000.000 | 16 | 500.000.000 | 41 | 1.200.000.000 | DP3AP2 | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi Kader Posyandu | Jumlah Kader yang terbina | - | - | - | - | - | - | 275 | 300.000.000 | 330 | 400.000.000 | 440 | 500.000.000 | 1.045 | 1.200.000.000 | DP3AP2 | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai) | 400 lbr | 500 lbr | 4,800,000 | 600 lbr | 5,700,000 | 650 lbr | 6,600,000 | 700 lbr | 7,500,000 | 750 lbr | 8,400,000 | 800 lbr | 9,300,000 | 4000 lbr | 42,300,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Periode pembayaran rekening (bulan) | 12 bln | 12 bln | 103,000,000 | 12 bln | 133,000,000 | 12 bln | 163,000,000 | 12 bln | 193,000,000 | 12 bln | 223,000,000 | 12 bln | 253,000,000 | 12 bln | 1,068,000.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan | 37 org | 37 org | 171,759,000 | 37 org | 200,000,000 | 39 org | 220,000,000 | 39 org | 240,000,000 | 40 org | 270,000,000 | 40 org | 300,000,000 | 40 org | 1,401,759.000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor | periode pemakaian jasa kebersihan kantor | 12 bln | 12 bln | 85,000,000 | 12 bln | 105,000,000 | 12 bln | 125,000,000 | 12 bln | 145,000,000 | 12 bln | 165,000,000 | 12 bln | 185,000,000 | 12 bln | 2,211,000.000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis ATK | 59 jenis barang | 59 jenis barang | 158,333,950 | 75 jenis barang | 180,000,000 | 90 jenis brg | 200,000,000 | 105 jenis brg | 220,000,000 | 120 jenis brg | 240,000,000 | 135 jenis brg | 260,000,000 | 135 jenis brg | 1,278,333.950 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan' | jumlah barang dan cetakan | 16 jenis barang cetak | 16 jenis barang cetak | 46,604,750 | 30 jenis barang cetak | 70,000,000 | 45 jenis brg cetak | 85,000,000 | 60 jenis brg cetak | 100,000,000 | 75 jenis brg cetak | 115,000,000 | 90 jenis brg cetak | 130,000,000 | 90 jenis brg | 546,604,750 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor | 9 jenis komponen listrik | 11 jenis komponen listrik | 17,782,000 | 20 jenis komponen listrik | 30,000,000 | 30 jenis komponen listrik | 40,000,000 | 40 jenis komponen listrik | 50,000,000 | 50 jenis komponen listrik | 60,000,000 | 60 jenis komponen listrik | 70,000,000 | 60 jenis komponen listrik | 267,782,000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 majalah/koran | 5 majalah / koran | 7,500,000 | 6 majalah / koran | 9,500,000 | 7 majalah / koran | 11,500,000 | 8 majalah / koran | 13,500,000 | 9 majalah / koran | 15,500,000 | 10 majalah / Koran | 17,500,000 | 10 majalah / Koran | 75,000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat | jumlah peserta rapat/tamu dll | 6 kali rapat | 8 kali rapat | 20,000,000 | 8 kali rapat | 20,000,000 | 10 kali rapat | 40,000,000 | 10 kali rapat | 40,000,000 | 10 kali rapat | 45,000,000 | 10 kali rapat | 45,000,000 | 56 kali rapat | 210,000,000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 12 bln | 12 bln | 436,319,200 | 12 bln | 600,000,000 | 12 bln | 650,000,000 | 12 bln | 700,000,000 | 12 bln | 750,000,000 | 12 bln | 800,000,000 | 12 bln | 3,936,319,200 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | - | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 100,000,000 | 1 paket | 125,000,000 | 1 paket | 150,000,000 | 1 paket | 500,000,000 | DP3AP2 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangka t daerah Penang ung-jawab |
|--|---------|------|---|---|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | | | Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional | - | - | - | 21 unit | 50,000,000 | 21 unit | 50,000,000 | 22 unit | 60,000,000 | 22 unit | 60,000,000 | 22 unit | 70,000,000 | 22 unit | 290,000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | - | 10 unit | 50,000,000 | 15 unit | 75,000,000 | 15 unit | 75,000,000 | 20 unit | 100,000,000 | 20 unit | 100,000,000 | 20 unit | 400,000,000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga | jumlah penyediaan peralatan rumah tangga | - | - | - | 8 unit | 50,000,000 | 8 unit | 50,000,000 | 12 unit | 100,000,000 | 12 unit | 100,000,000 | 15 unit | 120,000,000 | 15 unit | 420,000,000 | DP3AP2 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor | 9 unit | 11 unit | 47,929,940 | 10 unit | 70,000,000 | 10 unit | 70,000,000 | 10 unit | 90,000,000 | 10 unit | 110,000,000 | 10 unit | 130,000,000 | 10 unit | 517,929,940 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaaan meubeler | - | - | - | 10 unit | 50,000,000 | 10 unit | 70,000,000 | 10 unit | 90,000,000 | 10 unit | 110,000,000 | 10 unit | 130,000,000 | 10 unit | 450,000,000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 tahun | 1 tahun | 83,200,000 | 1 paket | 100,000,000 | 1 paket | 110,000,000 | 1 paket | 120,000,000 | 1 paket | 140,000,000 | 1 paket | 150,000,000 | 1 paket | 703,200,000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 19 unit kendaraan | 19 unit kendaraan | 250,680,000 | 21 unit kendaraan | 300,000,000 | 22 unit kendaraan | 400,000,000 | 24 unit kendaraan | 500,000,000 | 25 unit kendaraan | 600,000,000 | 26 unit kendaraan | 700,000,000 | 26 unit kendaraan | 2,750,680,000 | DP3AP2 |
| | | | kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 115 unit | 115 unit | 80,900,000 | 125 unit | 100,000,000 | 135 unit | 120,000,000 | 145 unit | 145,000,000 | 155 unit | 155,000,000 | 165 unit | 165,000,000 | 165 unit | 765,900,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/operasional | jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional | - | - | - | 2 unit | 600,000,000 | 2 unit | 600,000,000 | 3 unit | 700,000,000 | 3 unit | 700,000,000 | 3 unit | 800,000,000 | 3 unit | 3,400,000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | - | - | - | 10 unit | 80,000,000 | 10 unit | 80,000,000 | 15 unit | 100,000,000 | 15 unit | 100,000,000 | 15 unit | 150,000,000 | 15 unit | 510,000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | - | - | - | 1 paket | 20,000,000 | 1 paket | 30,000,000 | 1 paket | 40,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 60,000,000 | 1 paket | 200,000,000 | DP3AP2 |
| | | | Kegiatan rehabilitasi sedang/berat pagar kantor | Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat pagar kantor | - | - | - | 1 paket | 20,000,000 | 1 paket | 30,000,000 | 1 paket | 40,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 60,000,000 | 1 paket | 200,000,000 | DP3AP2 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|---|---------|------|---|--|--|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Tahun-6 | | target | Rp | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| | | | Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 70 org/stel | 90 org/stel | 36,000,000 | 95 org/stel | 38,000,000 | 100 org/stel | 40,000,000 | 105 org/stel | 42,000,000 | 110 org/stel | 46,000,000 | 115 org/stel | 50,000,000 | 115 org/stel | 252,000,000 | DP3AP2 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal | jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal | 50 org | 50 org | 65,000,000 | 50 org | 65,000,000 | 50 org | 70,000,000 | 50 org | 75,000,000 | 50 org | 80,000,000 | 50 org | 85,000,000 | 300 org | 440,000,000 | DP3AP2 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan, evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan | 8 jenis laporan / 1 x rakor | 15 jenis/laporan/3 xrakor | 224,000,000 | 15 Jenis laporan/ 3x rakor/ monev | 250,000,000 | 15 Jenis laporan /3x rakor/ monev | 275,000,000 | 15 Jenis laporan /3x rakor/ monev | 265,000,000 | 15 Jenis laporan/ 3x rakor/ monev | 280,000,000 | 15 Jenis laporan/ 3x rakor/ monev | 300,000,000 | 15 Jenis laporan/ 3x rakor/ monev | 1,594,000,000 | DP3AP2 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi (DP3AP2) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target Dan Realisasi Kinerja APBD Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja APBD Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7
Pencapaian Kinerja APBD Tahun 2020

| Sasaran Kinerja | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|--|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya Partispasi Perempuan dalam pembangunan | Persentase Partispasi Perempuan dalam Pembangunan | 30 % | 12 % | 40 % |
| Meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100 % | 100 % | 100 % |
| Meningkatkan pemenuhan Hak-Hak Anak | Persentase jumlah Kab / Kota Layak Anak | 81,8 | 54,54 % | 66,67 % |
| Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase BumDesa yang terbentuk | 100 % | 86,95 % | 86,95% |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persentase peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG | 20 % | 65 % | 32,5 % |
| Meningkatkan kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa | Persentase Desa cepat berkembang | 7 % | 12,22 % | 17,4 % |
| Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia produktif | Total fertility rate (TFR) | 2,21 | 2,31 | 10,4 |
| Persentase rata-Rata | | | | 56,74 % |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum persentase rata-rata pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis Tahun 2020 adalah sebesar 56,74 % Kondisi ini dapat tercapai karena peningkatan dari indikator sasaran persentase Peningkatan kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG yang ditargetkan sebesar 20 % sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 32,5 dan

persentase desa cepat berkembang yang ditargetkan sebesar 7 % sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 12,22 % . Dalam penentuan target dilihat kondisi / data tersedia pada Tahun 2020 dan realisasi capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 55,2775 %, tetapi hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- a. Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintahan Daerah;
- b. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
- c. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 2/INGUB/BAKEUDA/2020 tentang Refocusing- Realokasi Kegiatan dan Penghitungan Pergeseran Mendahului Perubahan APBD Tahun 2020 dalam upaya penanganan Covid-19.
- d. Dengan terbitnya Peraturan di atas dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Tahun 2020 tidak dapat terpenuhi dengan baik melalui dukungan anggaran yang tersedia.

2. Target Dan Realisasi Kinerja APBN Tahun 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020 mendapat anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi sebesar **Rp. 31.508.604.000,-** dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar **Rp. 650.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Target dan realisasi APBN tahun 2020 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Tabel 8

Capaian kinerja APBN Tahun 2020

| No | Program/ Kegiatan/ Uraian | Target | Capaian | Hasil |
|----|---------------------------|-----------|--|---|
| 1 | Pendampingan Desa | 726 Orang | Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran honorarium, Bantuan Operasional dan Asuransi Pendamping Desa se-Provinsi Jambi | Terlaksananya kegiatan pembayaran honorarium, Bantuan Operasional dan asuransi Pendamping Desa se-Provinsi Jambi serta Operator Komputer Kabupaten selama 1 Tahun dengan jumlah existing per Desember 2020 sebanyak 690 orang Tenaga Pendamping dan 19 orang Operator |

| | | | | |
|---|---|-------|---|--|
| | | | | Komputer |
| 2 | Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendesa No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 | 1 Keg | Pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendesa No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 | Terlaksananya Rapat Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2021 |
| 3 | Sekretariat Provinsi | 1 Keg | Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan administrasi pada Sekretariat Dekonsentrasi dan Pendampingan | Tersedia dan terkelolanya administrasi serta pelaporan |

Tabel. 9
Realisasi Kinerja APBN Tahun 2020

| Indikator Kinerja | Target | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Dana |
|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | |
| a. Jumlah Pendamping yang kompeten | 726 orang | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 31.508.604.000 | 31.096.411.521 | 412.192.479 |
| | | Pendampingan Desa | 30.310.380.000 | 29.923.139.789 | 387.240.211 |
| b. Jumlah Desa yang meningkatkan kinerja penggunaan dana desa | Se- Provinsi Jambi | Evaluasi pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendesa No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 | 211.320.000 | 203.640.000 | 7.680.000 |
| | | Sekretariat Provinsi | 986.904.000 | 969.631.732 | 17.272.268 |

Sumber data ; Subbbag Program DP3AP2 tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dengan realisasi **fisik 100 % dan penyerapan dana Rp. 31.096.411.521 atau 97,78 %**.

b. Target Dan Realisasi APBN Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 10
Capaian Kinerja

| No | Program | Kegiatan/Uraian | Capaian | Hasil |
|----|--|--|--|--|
| | Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pelembagaan PPPA | | |
| 1 | | Bimbingan Teknis Konseling Keluarga Kesetaraan Gender dan Hak Anak | Meningkatnya konselor keluarga (UPTD/P2TP2A) di Kab/Kota | Terlatihnya konselor keluarga UPTD/P2TP2A di Kab/Kota |
| 2 | | Bimbingan Teknis Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui pendekatan konvensi hak anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) | Meningkatnya aktivis PATBM di Kab/Kota | Terlatihnya Aktivis PATBM di Kab/Kota |
| 3 | | Pelatihan konvensi hak anak dan manajemen kasus bagi SDM penyedia layanan perlindungan anak | Meningkatnya kualitas pelayanan SDM penyedia layanan perlindungan anak | Terlatihnya SDM penyedia layanan perlindungan anak |
| 4 | | Layanan Umum Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi | Meningkatnya layanan umum Teknis Dekonsentrasi | Terlaksananya layanan umum teknis dekonsentrasi |
| 5 | | Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) | Terlaksananya kegiatan BERJARAK di Kab/Kota | Tersedianya informasi data Covid-19 dan tersalurnya bantuan penanganan pandemic Covid-19 |

Tabel; 11
Target Dan Realisasi APBN

| Indikator Kinerja | Target | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Dana |
|--|-------------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 650.000.000,- | 590.414.000 | 59.586. |
| a. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di daerah | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pelembagaan PP PA | | | |
| | 11 Kab/Kota | Bimbingan Teknis Konseling Keluarga Kesetaraan Gender dan Hak Anak | 82.106.000 | 68.204.000 | 13.902 |
| | 11 | Bimbingan Teknis Pencegahan Kekerasan | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| | Kab/Kota | terhadap anak melalui Pendekatan Konvensi Hak Anak Bagi Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) | 125.266.000 | 108.364.000 | 16.902 |
| | 11 Kab /Kota | Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Manajemen Kasus Bagi SDM Penyedia Layanan Perlindungan Anak | 128.678.000 | 116.706.000 | 11.972 |
| | 11 Kab/Kota | Layanan Umum Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi | 54.800.000 | 38.050.000 | 16.750 |
| | 11 Kab/Kota | Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) | 259.150.000 | 259.090.000 | 60.000 |

I. Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

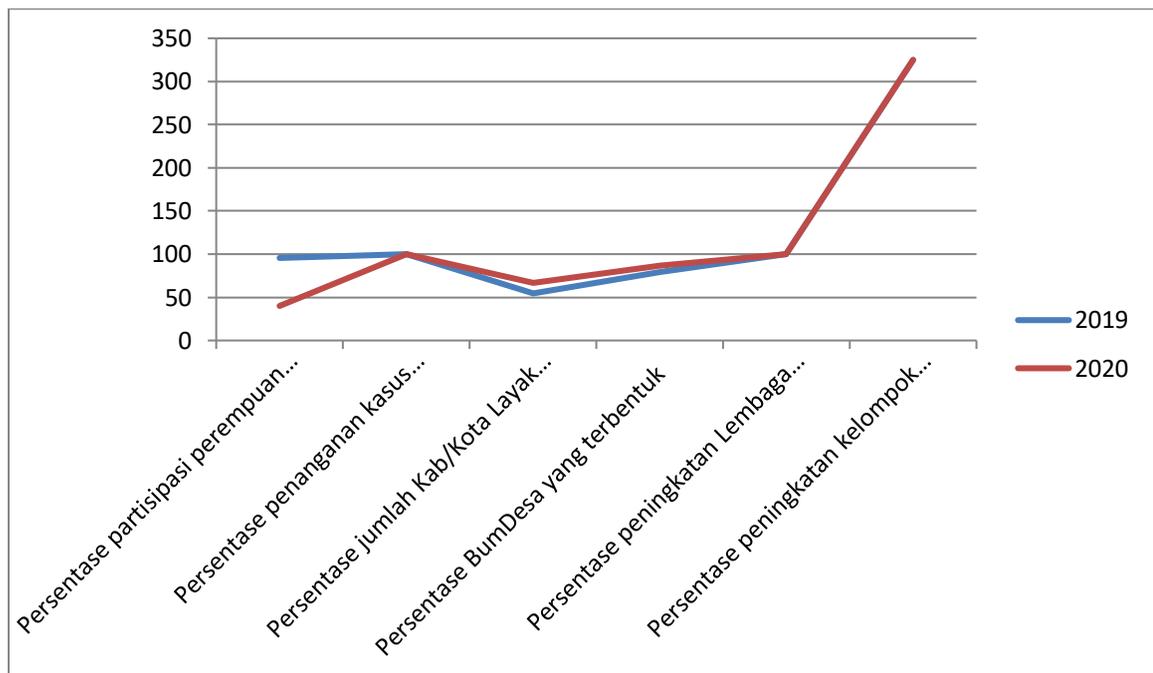
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 8
Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

| Sasaran strategis | Indikator sasaran | Realisasi | | Persentase Capaian | |
|---|---|-----------|---------|--------------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan | 28,58 % | 12 % | 95,26 % | 40 % |
| Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak | Persentase jumlah Kab/Kota Layak Anak | 54,54 % | 54,54 % | 54,54 % | 66,67 % |
| Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase BumDesa yang terbentuk | 79,54 | 86,95 % | 79,54 | 86,93 % |
| Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Persentase | 65 % | 65% | 325 % | 325 % |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | peningkatan kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG | | | | |
| Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan Desa | Persentase Desa cepat berkembang | 12,22 % | 12,22 % | 174,57 % | 174,57 % |
| Menurunnya Total Fertility Rate Per perempuan yang produktif | Total Fertility Rate (TFR) | 2,31 | 2,31 | 95,67 | 95,67 |
| | Persentase Rata-Rata | 55,27 % | 54,13 % | 128,07 % | 119,78 % |

Dapat dilihat melalui realisasi perbandingan Tahun 2019 dan 2020 capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mengalami penurunan terutama pada capaian persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan dan TFR yang tidak mencapai target.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dapat di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

| | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|-------------------------------|---|---|--------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Bidang Pemberdayaan Perempuan | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | (1) Persentase Indeks Pembangunan Gender | % | 90.00 | | 91.02 | | 92.02 | | 93.03 | | 94.00 | | 95.01 | | 95.01 | |
| | | (2) Persentase Indeks Pemberdayaan Gender | % | 62.01 | | 63.01 | | 64.00 | | 65.00 | | 66.01 | | 67.01 | | 67.01 | |
| | | (3) Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-Laki | % | 47,10 | | 46,60 | | 46,00 | | 45,70 | | 45,50 | | 45,00 | | 45,00 | |
| | | (4) Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Perempuan | % | 35,00 | | 34,90 | | 34,80 | | 34,70 | | 34,60 | | 34,50 | | 34,50 | |
| | Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan | Jumlah peserta per- Kab/Kota yang mengikuti system advokasi tindak pidana perdagangan | Orang | 40 | - | 60 | - | 70 | - | 85 | - | 100 | - | 125 | - | 480 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|-----------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| perlindungan anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | Jumlah Ranperda Anti Trafiking | Ranperda | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan | Jumlah Kab. Advokasi tindak pidana perdagangan | Tim Gugus Tugas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|--|---|--------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan monitoring , Evaluasi dan pelaporan | Jumlah data terpilah gender | buku | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - |
| Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Persentase Operasional P2TP2A | Persentase dari jumlah pelapor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| Kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan korban KDRT | Jumlah petugas pencatat dan pelaporan penanganan KDRT | orang | 30 | - | 30 | - | 50 | - | 80 | - | 100 | - | 150 | - | 440 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|--|---------------------|---|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | Jumlah penyusunan profil penangganan tindakan kekerasan terhadap perempuan | buku | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - |
| Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT | Kab/Kota | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan | Jumlah peserta bimtek PPGR dan Vokal Point di SKPD | Vokal point di SKPD | - | - | 100 | - | 150 | - | 200 | - | 250 | - | 300 | - | 1.000 | - |
| Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi | Jumlah peserta pemetaan potensi | lembaga | seluruh organisasi/le | - | seluruh organisasi/l | - | seluruh organisasi | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|--|--|--------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | | mbaga | | emba | | i/lem | |
| kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat | Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan | orang | 330 | - | 330 | - | 330 | - | 330 | - | 330 | - | 330 | - | 1.980 | - |
| Kegiatan rakor pemerintahan desa | Jumlah peserta pembinaan peserta rakor | orang | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|--------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintahan supra desa | Jumlah peserta Bimtek penguatan kelembagaan pemerintahan supra desa | orang | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 1.200 | - |
| Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintahan supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan masyarakat | jumlah peserta penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintahan supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan masyarakat | orang | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 2.100 | - |

| | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|--|---|--------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| BIDAN GEMERDAYA AN MASYARAKAT DESA | Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan | Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek penguatan kapasitas pengelolaan | Orang | 40 | 40 | 60 | 60 | 105 | - | 250 | - | 350 | - | 500 | - | 1.200 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|--|--|----------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif | Jumlah tenaga perempuan yang terlatih dalam pengembangan ekonomi produktif peningkatan pendapatan ekonomi keluarga | Orang | 100 | 100 | 320 | 320 | 40 | - | 100 | - | 200 | - | 500 | - | 950 | - |
| Kegiatan Pemberdayaan Nilai-nilai Kegotongroyongan Adat daerah dan masyarakat hukum adat (PMA) | Jumlah Kab/Kota yang memiliki nilai-nilai Kegotongroyongan dalam BBGRM dan Adat Daerah | Kab/Kota | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Remaja Putri Putus Sekolah di Perdesaaan | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan remaja putri putus sekolah di perdesaaan | Orang | 350 | - | 350 | - | 400 | - | 450 | - | 500 | - | 550 | - | 2.600 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|--|--|----------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa | Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam Program Inovasi Desa | Kab/Kota | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| Kegiatan Pembinaan TTG dan Posyantek | Kelompok TTG dan Posyantek di Kecamatan | Kab/Kota | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa | Jumlah Kabupaten peserta kelompok masyarakat yang terbina | Kab/Kota | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu Lansia dan Komda Lansia | Jumlah kabupaten terbentuknya posyandu lansia dan komda lansia | Kab/Kota | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanal | Jumlah Peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal | orang | 45 | 45 | 80 | 80 | 45 | - | 45 | - | 45 | - | 45 | - | 45 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|--|-----------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Posyandu | posyandu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Penguatan Pendamping di Perdesaan | Jumlah kabupaten dengan tenaga profesional untuk pendamping desa | Kab/Kota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dan Desa Hijau | Jumlah kelompok tani di desa hutan untuk melestarikan lingkungan hutan | Orang | 30 | 1- | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| Kegiatan Pameran Hasil Karya di Bidang Pembangunan/ Jambore | Jumlah Tenaga pelatih di bidang industri rumahan | Kali/Keg. | 3 | 250.000.000 | 3 | 450.000.000 | 3 | 500.000.000 | 3 | 600.000.000 | 3 | 700.000.000 | 3 | 800.000.000 | 3 | 2.500.000.000 |
| Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS | Jumlah Kab/Kota yang memiliki Pembinaan P2WKSS | Kab/Kota | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |

| | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| BIDAN G PENGELOMPOKAN PENDUDUK | Program Pengendalian Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | - | - | 2.04% | 1.98% | 1.91% | 1.82% | | | | | | | | |
| | | Persentase PUS Anggota POKTAN yang ber KB (BKB, BKR, BKL) | % | 77.00 | | 78.00 | | 79.00 | | 80.00 | | 81.00 | | 82.00 | | 82.00 | |
| | | Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | % | 7.00 | | 6.55 | | 6.10 | | 5.65 | | 5.30 | | 5.15 | | 5.15 | |
| | | Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) | % | 68.40 | | 68.80 | | 69.20 | | 69.60 | | 70.00 | | 70.50 | | 70.50 | |
| | | Angka Kelahiran Total (TFR 15-49 Tahun) | WUS/Julah Kelahiran | 2.28 | | 2.26 | | 2.23 | | 2.21 | | 2.18 | | 2.15 | | 2.15 | |
| | | Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15-19) | Per 1000 Kelahiran | 71.00 | | 69.00 | | 67.00 | | 65.00 | | 60.00 | | 50.00 | | 50.00 | |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|----------|---|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| | Tahun) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 Tahun) | % | 13.30% | | 11.80 % | | 9.40% | | 7.10% | | 6.00% | | 5.50% | | 5.50% | |
| Penguatan kelembagaan Komda Lansia | Jumlah terlaksananan ya program komda Lansia | Kab/Kota | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Kegiatan penguatan advokasi pengendalian penduduk dan KB | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | orang | - | - | 200 | - | 250 | - | 300 | - | 300 | - | 350 | - | 1.400 | - |
| Kegiatan rakor penyerasian kebijakan kependudukan KB dan kespro | Jumlah peserta rakor | orang | - | - | 200 | - | 250 | - | 300 | - | 300 | - | 350 | - | 1.400 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|--|---|----------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan Peningkatan Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi | | Kab/Kota | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Kegiatan peningkatan peran serta KB Pria (Vasektomi) dalam pengendalian penduduk | Jumlah peserta yang mengikuti | Kab/Kota | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Pembinaan pembentukan kampung KB | Jumlah kampung KB | Kab/Kota | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Kegiatan Fasilitasi sosialisasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja | Jumlah peserta sosialisasi | orang | - | - | 200 | - | 250 | - | 300 | - | 300 | - | 350 | - | 1.400 | - |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|--------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,mat erai) | Lembar | 500 | 4,800,000 | 1250 | 5,700,000 | 1450 | 6,600,000 | 1650 | 7,500,000 | 1850 | 8,400,000 | 2050 | 9,300,000 | 8750 | 42,300,000 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik | Periode pembayaran rekening (bulan) | Bulan | 12 | 103,000,000 | 12 | 133,000,000 | 12 | 163,000,000 | 12 | 193,000,000 | 12 | 223,000,000 | 12 | 253,000,000 | 12 | 1,068,000,000 |
| Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan | orang | 37 | 171,759,000 | 37 | 200,000,000 | 39 | 220,000,000 | 39 | 240,000,000 | 40 | 270,000,000 | 40 | 300,000,000 | 40 | 1,401,759,000 |
| Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor | periode pemakaian jasa kebersihan kantor | Bulan | 12 | 85,000,000 | 12 | 105,000,000 | 12 | 125,000,000 | 12 | 145,000,000 | 12 | 165,000,000 | 12 | 185,000,000 | 12 | 810,000,000 |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|---------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| kegiatan penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis ATK | Jenis | 59 | 158,333,950 | 75 | 180,000,000 | 90 | 200,000,000 | 105 | 220,000,000 | 120 | 240,000,000 | 135 | 260,000,000 | 135 | 1,258,333,950 |
| kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan' | jumlah barang dan cetakan | Jenis | 16 | 46,604,750 | 30 | 70,000,000 | 45 | 85,000,000 | 60 | 100,000,000 | 75 | 115,000,000 | 90 | 130,000,000 | 90 | 546,604,750 |
| Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor | Jenis | 11 | 17,782,000 | 20 | 30,000,000 | 30 | 40,000,000 | 40 | 50,000,000 | 50 | 60,000,000 | 60 | 70,000,000 | 60 | 267,782,000 |
| kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Majalah/Koran | 5 | 7,500,000 | 6 | 9,500,000 | 7 | 11,500,000 | 8 | 13,500,000 | 9 | 15,500,000 | 10 | 17,500,000 | 10 | 75,000,000 |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|---------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat | jumlah peserta rapat/tamu dll | Kali/kegiatan | 8 | 20,000,000 | 8 | 20,000,000 | 10 | 40,000,000 | 10 | 40,000,000 | 10 | 45,000,000 | 10 | 45,000,000 | 10 | 210,000,000 |
| kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | Bulan | 12 | 436,319,200 | 12 | 600,000,000 | 12 | 650,000,000 | 12 | 700,000,000 | 12 | 750,000,000 | 12 | 800,000,000 | 12 | 3,936,319,200 |
| Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Paket | 0 | 0 | 1 | 50,000,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 125,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 500,000,000 |
| Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional | Unit | 0 | 0 | 21 | 50,000,000 | 21 | 50,000,000 | 22 | 60,000,000 | 22 | 60,000,000 | 22 | 70,000,000 | 22 | 290,000,000 |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|--------|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Unit | 0 | 0 | 10 | 50,000,000 | 15 | 75,000,000 | 15 | 75,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 400,000,000 |
| kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga | jumlah penyediaan peralatan rumah tangga | Unit | 0 | 0 | 8 | 50,000,000 | 8 | 50,000,000 | 12 | 100,000,000 | 12 | 100,000,000 | 15 | 120,000,000 | 15 | 420,000,000 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor | Unit | 11 | 47,929,940 | 10 | 70,000,000 | 10 | 70,000,000 | 10 | 90,000,000 | 10 | 110,000,000 | 10 | 130,000,000 | 61 | 517,929,940 |
| kegiatan pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan meubeler | Unit | 0 | 0 | 10 | 50,000,000 | 10 | 70,000,000 | 10 | 90,000,000 | 10 | 110,000,000 | 10 | 130,000,000 | 50 | 450,000,000 |

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Target Akhir Renstra | |
|---|---|--------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi | target | Realisasi |
| kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Paket | 1 | 83,200,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 110,000,000 | 1 | 120,000,000 | 1 | 140,000,000 | 1 | 150,000,000 | 6 | 703,200,000 |
| kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Unit | 19 | 250,680,000 | 21 | 300,000,000 | 22 | 400,000,000 | 24 | 500,000,000 | 25 | 600,000,000 | 26 | 700,000,000 | 26 | 2,750,680,000 |
| kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Unit | 115 | 80,900,000 | 125 | 100,000,000 | 135 | 120,000,000 | 145 | 145,000,000 | 155 | 155,000,000 | 165 | 165,000,000 | 165 | 765,900,000 |
| Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/operasional | jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional | Unit | 0 | 0 | 2 | 600,000,000 | 2 | 600,000,000 | 3 | 700,000,000 | 3 | 700,000,000 | 3 | 800,000,000 | 3 | 3,400,000,000 |
| Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Unit | 0 | 0 | 10 | 80,000,000 | 10 | 80,000,000 | 15 | 100,000,000 | 15 | 100,000,000 | 15 | 150,000,000 | 65 | 510,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | orang | 90 | 36,000,000 | 95 | 38,000,000 | 100 | 40,000,000 | 105 | 42,000,000 | 110 | 46,000,000 | 115 | 50,000,000 | 115 | 252,000,000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal | jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal | orang | 50 | 65,000,000 | 50 | 65,000,000 | 50 | 70,000,000 | 50 | 75,000,000 | 50 | 80,000,000 | 50 | 85,000,000 | 300 | 440,000,000 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan, evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan | laporan /Kegiatan | 15 jenis/laporan /3x rakor | 224,000,000 | 15 Jenis laporan/3x rakor / monev | 250,000,000 | 15 Jenis laporan/3x rakor / monev | 275,000,000 | 15 Jenis laporan/3x rakor / monev | 265,000,000 | 15 Jenis laporan/3x rakor / monev | 280,000,000 | 15 Jenis laporan/3x rakor / monev | 300,000,000 | 15 Jenis laporan/3x rakor / monev | 1,594,000,000 |

4. Analisis Keberhasilan dan Hambatan

a. Analisis Keberhasilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi terdapat 4 (empat) Urusan yaitu :

- 1). Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program Dn kegiatan tahun 2020, sebagai berikut :
 - a). Penanganan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada UPTD PPA Provinsi Jambi Tahun 2020 sebanyak 120 (seratus dua puluh) pelapor terjadi penurunan dibandingkan dengan jumlah Pengaduan Kekerasan di Tahun 2019 sebanyak 147 (tujuh puluh dua) pelapor;
 - b). Terbentuknya Focal Point di 26 OPD dan Tercapainya Anggaran yang ber-Responsif Gender di 18 OPD di Provinsi Jambi;
 - c). Terbinanya Organisasi Wanita yaitu BKOW dan DWP Provinsi Jambi;
 - d). . Terbentuknya Kota Layak anak di Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota antara lain:
 - Provinsi Jambi
 - Kota Jambi
 - Kabupaten Batanghari
 - Kabupaten Tebo
 - Kabupaten Bungo
 - Kabupaten Tanjab Timur
 - Kota Sungai Penuh
 - f). Terbinanya Organisasi Wanita yaitu BKOW dan DWP Provinsi Jambi
- 2). Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 yaitu :
 - a). Terbinanya Kampung KB di 11 Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi
- 3). . Urusan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, yaitu :
 - a). Meningkatnya kapasitas aparatur desa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi
 - b). Terlaksananya 10 Program PKK di Provinsi Jambi
- 4). Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020, yaitu
 - a). Tersedianya Pendamping Desa sebanyak 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang
 - b). Terlaksananya Bintek Penguatan Kapasitas Pengelolaan BumDes

b. Hambatan

Permasalahan –permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut :

- 1). Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap OPD untuk menunjang proses perencanaan
- 2). Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya , sarana dan prasarana

- 3). Rendahnya dukungan atau komitmen Kab/Kota dalam pengiriman anak untuk mengikuti kegiatan Forum Anak di Kab/Kota
- 4). Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan
- 5). Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja
- 6). Adanya Surat Edaran Gubernur Jambi yang menekan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pemangkasan anggaran dalam upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi

c. Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut :

- 1), Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data;
- 2).Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif;
- 3). Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kepada Kab/Kota di Provinsi Jambi;
- 4). Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;
- 5). Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di kabupaten-kabupaten lain.

d. Analisis Sumber Daya

Efisiensi pada penggunaan sumber daya yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi baik dari sumber daya manusia yang tersedia dapat dilihat melalui analisis sumber daya dengan komposisi sebagai berikut :

1). Keadan Pegawai

- a). Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi pendidikan

Tabel 10

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

| No | Pendidikan | Tahun | | | | | Ket |
|----|------------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | SD | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | SLTP | - | - | - | - | - | |
| 3 | SLTA/SMK | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | |
| 4 | DI - DIII | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | DIV-S1 | 52 | 54 | 60 | 58 | 54 | |
| 6 | S2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | |

b). Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Tabel 11

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

| No | Pangkat/Gol | Tahun | | | | | Ket |
|----|-------------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | IV | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2 | III | 6 | 6 | 64 | 59 | 54 | |
| 3 | II | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | I | - | - | - | - | - | |

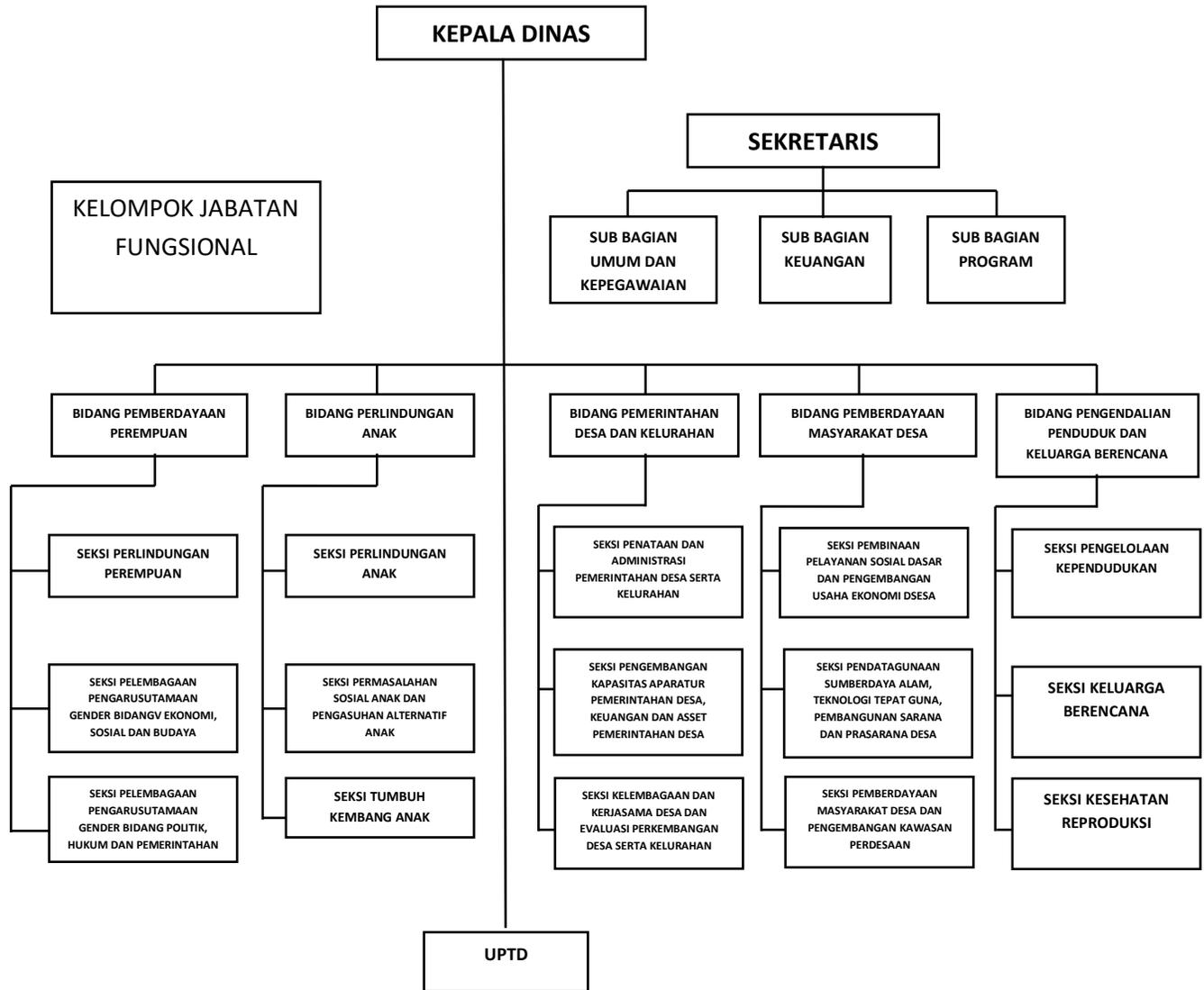
c). Jumlah Pegawai Berdasarkan jabatan Struktural

Tabel 12

Jumlah Pejabat Struktural

| No | Jabatan | Jumlah | Keterangan |
|----|------------|--------|-----------------|
| 1 | Eselon II | 1 | Kadis |
| 2 | Eselon III | 7 | 2 Bidang Kosong |
| 3 | Eselon IV | 21 | 1 Orang Pensiun |
| 4 | Fungsional | - | |

2). Struktur Organisasi



Melalui analisis sumber daya di atas adanya peningkatan baik dari jumlah pegawai dan terisinya seluruh jabatan eselon pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, hal ini jelas sangat mendukung terlaksananya program dan kegiatan di Tahun 2019 sehingga indikator sasaran kinerja di Tahun 2019 dapat tercapai dan terlaksananya dengan baik seluruh program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

3). Analisis Program dan Kegiatan

Analisis Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dapat di lihat dari capaian realisasi target Program dan kegiatan Tahun 2020 dan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 13
Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2020 DP3AP2 Provinsi Jambi

| SASARAN | | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | | | | Realisasi Per Triwulan | K e t |
|---|---|--|---|---|--|--------|--|---|-------|
| Uraian | Indikator Kinerja | | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | |
| Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan | Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Evaluasi Pelaksanaan PUG | - Terlaksananya evaluasi PUG - mengoptimalkan kinerja vocak point PUG di OPD Prov Jambi | % | Tw 1 : 65 % Tw 2 : 0 % Tw 3 : 35 % Tw 4 : 0 % | Tw 1 : 22,91 % Tw 2 : 24,29% Tw 3 : 70,86 % Tw 4 : 100 % | |
| | | | | Pembinaan Organisasi perempuan | Terbinanya Organisasi perempuan | % | Tw 1 : 45 % Tw 2 : 30 % Tw 3 : 15 % Tw 4 : 10 % | Tw 1 : 13,17 % Tw 2 : 33,99% Tw 3 : 38,79 Tw 4 : 100 % | |
| Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | | Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan | Terlaksananya pendampingan korban kekerasan | % | Tw 1 : 0 % Tw 2 : 100 % Tw 3 : 0 % Tw 4 : 0 % | Tw 1 : 29,82% Tw 2 : 55,63% Tw 3 : 77,93 Tw 4 : 98,83 % | |
| | | | | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT | Meningkatnya pengetahuan dan Pemahaman SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT | % | Tw 1 : 100 % Tw 2 : 0 % Tw 3 : 0 % Tw 4 : 0 % | Tw 1 : 78,21% Tw 2 : 78,21% Tw 3 : 70,03 Tw 4 : 100 % | |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak | Persentase jumlah Kab/Kota Layak Anak | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | | Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak | Meningkatnya pemahaman tentang KLA di Kab/Kota Se- Provinsi Jambi | % | Tw 1 : 80 % Tw 2 : 0 % Tw 3 : 20 % Tw 4 : 0 % | Tw 1 : 13,90% Tw 2 : 18,53% Tw 3 : 47,33 % Tw 4 : 100 % | |
| | | | | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Meningkatnya partisipasi dalam Forum Anak kab/Kota | % | Tw 1 : 0 % Tw 2 : 30 % Tw 3 : 60 % Tw 4 : 10 % | Tw 1 : 61,91% Tw 2 : 70,86% Tw 3 : 70,86 % Tw 4 : 100 % | |
| | | | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang perlindungan Anak | Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Anak | % | Tw 1 : 0 % Tw 2 : 30 % Tw 3 : 60 % Tw 4 : 10 % | Tw 1 : 63,23% Tw 2 : 49,90% Tw 3 : 77,61 % Tw 4 : 100 % | |
| Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase BumDesa yang terbentuk | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | Penguatan Kapasitas pengelola BumDesa | Meningkatnya kapasitas pengelolaan Bumdes | % | Tw 1 : 50 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 0 % | Tw 1 : 12,66% Tw 2 : 52,27% Tw 3 : 93,80 % Tw 4 : 100 % | |
| | Persentase Peningkatan Lembaga | Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % | | Penguatan Pendampingan di | Meningkatnya Pendampingan di Perdesaan | % | Tw 1 : 100 % Tw 2 : 0 % | Tw 1 : 0 Tw 2 : 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Kemasyarakatan desa/Kelurahan Yang Aktif | Tw 4 : 25 % | | Pedesaan | | | Tw 3 : 0 % Tw 4 : 0 % | Tw 3 : 100 % Tw 4 : 100 % | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG | Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG | % | Tw 1 : 0 % Tw 2 : 10 % Tw 3 : 90 % Tw 4 : 0 % | Tw 1 : 0 Tw 2 : 30,14% Tw 3 : 30,14 % Tw 4 : 100 % | |
| Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Cepat Berkembang | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya 10 Program Pokok PKK | % | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | Tw 1 : 33,87% Tw 2 : 34,01 Tw 3 : 51,20 % Tw 4 : | |
| | | | | Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | Terlaksananya evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan | % | Tw 1 : 10 % Tw 2 : 75 % Tw 3 : 15 % Tw 4 : 0 % | Tw 1 : 13,27% Tw 2 : 55,58% Tw 3 : 53,02 % Tw 4 : 100 % | |
| | | | | Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan Desa | Terlaksananya penguatan kapsitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa | % | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | Tw 1 : 0 Tw 2 : 100% Tw 3 : 100 % Tw 4 : 100 % | |
| Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi | Tw 1 : 25 % Tw 2 : 25 % Tw 3 : 25 % Tw 4 : 25 % | Total Fertility Rate (TFR) | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR) | Terlaksananya monitoring dan evaluasi di Kabupaten Kerinci dan Merangin tentang pencegahan bagaya HIV/AIDS | % | Tw 1 : 0 % Tw 2 : 30 % Tw 3 : 60 % Tw 4 :10 % | Tw 1 : 0 % Tw 2 : 0% Tw 3 : 0% Tw 4 :100 % | |
| | | | | Workshop Pendidikan Program KKBPK | Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Program KKBPK | % | Tw 1 : 60 % Tw 2 : 20 % Tw 3 : 15 % Tw 4 : 5 % | Tw 1 : % Tw 2 : 0% Tw 3 : 0% Tw 4 :100 % | |
| | | | | Penguatan Advokasi Pengendalian Penduduk dan KB | Terlaksananya advokasi Pengendalian Penduduk dan KB | % | Tw 1 : 60 % Tw 2 : 10 % Tw 3 : 15 % Tw 4 : 10 % | Tw 1 : 0 % Tw 2 : 0% Tw 3 : 0% Tw 4 :100 % | |

B. Realisasi Anggaran

Pagu APBD Murni Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Rp. 16.530.920.196,80,- yang terdiri dari (Belanja Tidak langsung Rp. 11.061.735.718.80,- dan Belanja langsung Rp.5.469.184.480,-)

Sehubungan dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia, khususnya Provinsi Jambi terkena wabah tersebut, sehingga perlu penanganan yang serius dan tentunya perlu didukung oleh dana.

Kondisi yang demikian, Pemerintah Provinsi Jambi memerintahkan semua Perangkat Daerah untuk melakukan pemangkasan terhadap anggaran yang ada. Dan hasil perubahan anggaran dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berkurang anggaran menjadi Rp. 12.859.045.906,80,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 9.621.432.899,80,- dan Belanja Langsung Rp. 5.469.184.480,-

Sebagai bentuk realisasi keuangan yang transparan dan akuntabel, di bawah ini disajikan capaian kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Tabel 14

Realisasi Fisik dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020

| Urusan | No | Program/Kegiatan | Pagu | Realisasi | | Sisa dana |
|--|----|---|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | Keuangan | Fisik | |
| Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak | I | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak | | | | |
| | | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 77.100.000 | 77.097.200 | 100 % | 2.800 |
| | | Evaluasi Pelaksanaan PUG | 109.100.320 | 109.100.320 | 100 % | 0 |
| | | Pembinaan Organisasi Perempuan | 217.727.700 | 217.638.808 | 100 % | 88.892 |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak | 53.975.000 | 53.975.000 | 100 % | 0 |
| | | KIE tentang Perlindungan Anak | 58.150.000 | 58.062.000 | 100 % | 88.000 |
| | | TOT SDM Pelayanan dan pendampingan korban KDRT | 102.454.987 | 102.454.987 | 100 % | 0 |
| | | Pelayanan dan pendampingan korban kekerasan | 246.814.000 | 243.934.960 | 98,83 % | 2.879.040 |
| Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana | II | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|-------------|-------------|-------|------------|
| | 1 | Advokasi Pengendalian Penduduk dan KB | 82.000.000 | 82.000.000 | 100 % | 0 |
| | 2 | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 0 |
| | 3 | Workshop Pendidikan Program KKBPK | 28.688.000 | 28.688.000 | 100 % | 0 |
| | III | Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | | | | |
| | 1 | Penguatan pendampingan di Pedesaan | 84.399.800 | 84.399.800 | 100 % | 0 |
| | 2 | Pembinaan Posyandu dan Gelar TTG | 66.346.500 | 66.346.500 | 100 % | 0 |
| | 3 | Penguatan Kapasitas Pengelola BumDes | 49.366.000 | 49.366.000 | 100 % | 0 |
| | IV | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | | | | |
| | 1 | Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan | 68.367.062 | 60.579.050 | 100 % | 32 |
| | 2 | Penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan Desa | 15.170.000 | 15.170.000 | 100 % | 0 |
| | 3 | Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 715.000.000 | 703.306.904 | 100 % | 11.693.096 |
| | V | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | |
| | 1 | Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 210.972.500 | 210.972.500 | 100 % | 0 |
| | VI | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | |
| | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 3.510.000 | 3.504.000 | 100 % | 6.000 |
| | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 112.400.000 | 89.148.076 | 100% | 23.251.924 |
| | 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 96.651.800 | 96.651.800 | 100 % | 0 |
| | 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 80.000.000 | 79.113.384 | 100% | 886.010 |
| | 5 | Penyediaan alat tulis kantor | 85.426.415 | 85.169.799 | | 256.616 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | 6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 14.970.760 | 14.970.760 | 100 % | 0 |
| | 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 13.065.450 | 13.065.45 | 100 % | 0 |
| | 8 | Penyediaan makanan dan minuman | 13.715.713 | 12.975.000 | 100 % | 740.713 |
| | 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 205.379.400 | 195.186.342 | 100 % | 10.193.058 |
| | VII | Peningkatan Saran dan Prasarana | | | | |
| | 1 | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | 37.200.000 | 37.185.000 | 100 % | 15.000 |
| | 2 | Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional | 291.811.600 | 257.605.877 | 100 % | 34.205.723 |
| | VIII | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | |
| | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya | 63.050.000 | 63.050.000 | 100 % | 0 |
| | IX | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formla | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 % | 0 |
| Jumlah | | | 3.237.613.007 | 3.153.306.103 | 100 % | 84.306.904 |

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan baik walaupun tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2021
KEPALA DINAS

Dra.LUTHPIAH
Pembina Utama Muda
Nip. 19691215 198908 2 002